

## **PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT**

### **1. Konsep Pengembangan sosial**

Berbicara mengenai Pengembangan Masyarakat atau lebih dikenal dengan *Community Development* adalah ranah keilmuan dan praktek yang sangat luas dan bersifat makro. Sebagai sebuah ilmu pengembangan masyarakat merupakan metode yang berada pada tataran praktek. Pengembangan masyarakat juga merupakan khasanah praktek dan teori yang menekankan pada sisi seorang *community worker* dengan daerah binaannya. Pengembangan masyarakat bekerja dengan memiliki program-program jangka panjang dan jangka pendek yang tersusun dalam draft-draft renstra (rencana strategis). Pelaksanaan program-program yang ada diarahkan nantinya untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat setempat, agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Pengembangan masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif hingga kuratif, pengembangan masyarakat juga mengarahkan masyarakat dengan metode bimbingan dan pelayanan yang bersifat aksi reaktif dan partisipatif yang nyata di lapangan.

### **Sejarah Munculnya Pengembangan Masyarakat**

Pengembangan masyarakat telah menjadi suatu khasanah keilmuan saat ini yang bersifat implisit untuk diterapkan pada suatu komunitas masyarakat, atau juga terkadang bersifat eksplisit, menyentuh pada tataran usaha bersama, sebuah kemauan untuk hidup lebih baik, dan memiliki latar belakang sejarah secara keseluruhan untuk sebuah pengalaman.

Sejarah perjalanan khasanah keilmuan pengembangan masyarakat ini didasari oleh pemikiran dari Robert Owen ( 1771-1851 ) yang merupakan seorang pemikir sosial. Ia merumuskan sebuah gagasan yang mengacu kepada Perencanaan Masyarakat. Sebelumnya gagasan-gagasan tentang hal ini seringkali dihembuskan dan dikampanyekan oleh kalangan kaum utopis yang pernah pula melakukan perencanaan secara konsekuen

dan penting pada masa tahun 1920 dan 1930 di Afrika Barat. Dimana gagasan-gagasan itu digunakan oleh kaum utopis yang ada untuk melawan kekuasaan mutlak pihak kolonial, sehingga menyebabkan dibutuhkan sebuah usaha penguatan dan pengarahannya yang menjadikan masyarakat terjajah menjadi memiliki jiwa perlawanan dan pengkoordinasian terhadap kekuatan-kekuatan yang ada saat itu.

Lantas, ide-ide ini diadopsi oleh Mohandas Gandhi dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisasi Inggris saat itu dengan memperkenalkan sebuah pergerakan bernama *Swaraj*. Yang mengorganisasi kekuatan masyarakat untuk melawan ketergantungan elite di India, yang hingga akhirnya India mendapatkan kemerdekaannya dari tangan Inggris.

Hingga akhirnya pada masa kini format pengembangan masyarakat telah merambah kepada isu-isu yang bersifat global dan makrodisipliner. Semua tema-tema tentang kemiskinan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kekerasan, dll. Merupakan objek ranah pekerjaan para *community organizing*.

### **Definisi dan Karakteristik Pengembangan Masyarakat**

Pengembangan Masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.

Pengembangan masyarakat dapat pula didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan menurut Twelvetrees, pengembangan masyarakat adalah usaha dalam membantu orang biasa untuk meningkatkan lingkungannya dengan melakukan aksi kolektif.

Pengembangan masyarakat juga diartikan lebih dari sekedar pengembangan ekonomi, melainkan pengembangan masyarakat adalah usaha untuk membangun lingkungan pada tingkatan lokal dengan penekanan pada peningkatan pembangunan ekonomi, penguatan dan pemantapan sosial, dan pengembangan sektor non-profit.

Pengembangan masyarakat juga didefinisikan dengan sebagaimana asal katanya, yakni pengembangan masyarakat, pengembangan masyarakat terdiri dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya.

Definisi pengembangan masyarakat yang lainnya ialah sebuah terminologi yang bersifat luas pada tataran praktek dan di aplikasikan oleh para praktisi dan akademisi pemimpin sipil, aktivis, pembangun peradaban, para profesional, demi satu tujuan untuk melakukan penguatan aspek lokal yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dengan penggalan potensi yang ada secara mandiri.

Dengan menggunakan kerangka teoritis yang diajukan oleh James B. Cook (1994), konsep *community development* tetap memiliki karakteristik utama, yakni:

- Fokus hanya kepada komunitas saja
- Kesadaran membuat dorongan perubahan struktural, bukan melawannya
- Menggunakan pekerja profesional
- Diawali oleh grup/ kelompok, agen, atau institusi luar untuk unit komunitas
- Menekankan partisipasi public
- Partisipasi dengan maksud untuk menolong diri sendiri
- Menumbuhkan ketergantungan untuk demokrasi partisipatif sebagai moda untuk pembuatan keputusan komunitas
- Menggunakan pendekatan holistik.

Twelvetrees membagi perspektif teoritis pengembangan masyarakat ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki system pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui

pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Payne sebagai sebuah model pendekatan dengan dukungan minoritas masyarakat, sebagai contoh penggambaran perhatian terhadap keseimbangan ketetapan pelayanan. Pendekatan profesional dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diebri label sebagai pendekatan yang bermatra transformatif.

Pengembangan masyarakat juga memiliki definisi peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi dan kondisi budaya disebuah desa atau di kota kecil. Atau juga dikatakan sebagai proses usaha dari beberapa orang dalam suatu komunitas untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan kondisi kebudayaan dengan melalui campur tangan pemerintah untuk mencapai kesatuan kesejahteraan.

### **Pengembangan Masyarakat dan Ilmu Pendukungnya**

Pengembangan masyarakat bukanlah suatu khasanah wawasan dan keilmuan yang berdiri sendiri, namun pengembangan masyarakat adalah bagian dari penjabaran makro dan berasal dari multidisiplin keilmuan. Pengembangan masyarakat ditunjang dengan ilmu-ilmu dasar yang menyumbang lahirnya dan berbagai konsep yang ada pun ditunjang dengan dukungan dari ilmu-ilmu tersebut. Ilmu-ilmu yang dimaksud diantaranya dijelaskan dibawah ini :

#### *a. Sosiologi*

Tak dipungkiri bahwa ilmu ini juga turut memiliki sumbangan besar bagi konsep pengembangan masyarakat ini. Sosiologi adalah ilmu yang memiliki disiplin intelektual yang secara khusus, sistematis, dan terandalkan mengembangkan pengetahuan tentang hubungan sosial manusia pada umumnya dan tentang produk dari hubungan tersebut (Hoult, 1969).

Definisi sosiologi yang dapat diambil dalam konteks ke-Indonesiaan sebagaimana yang ditegaskan oleh Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, misalnya,

mendefinisikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Sedangkan proses sosial adalah pengaruh timbal-balik antara pelbagai segi kehidupan bersama.

Sosiologi sendiri memiliki definisi yang sejalan dengan masyarakat dan sangat berkaitan dengan aksi-partisipasi masyarakat sebagai konsep dasar pengembangan masyarakat, hal ini sebagaimana dalam artian bahwa sosiologi mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, tidak sebagai individu yang terlepas dari kehidupan masyarakat. Fokus bahasan sosiologi adalah interaksi manusia, yaitu pada pengaruh timbal-balik diantara dua orang atau lebih dalam perasaan, sikap, dan tindakan.

Korelasi yang pas antara ilmu sosiologi ini dengan pengembangan masyarakat adalah adanya sebuah keterikatan yang bersifat sinergis diantara keduanya. Pengembangan masyarakat merupakan ranah praktek dari penerapan teori-teori yang dikemukakan oleh para sosiolog. Dikarenakan fokus bahasan sosiologi adalah perhatian pada hubungan timbal balik diantara manusia dan anggota masyarakat dilingkungannya.

Pengembangan masyarakat memiliki tugas untuk menjaga hubungan timbal balik itu dan memberikan penguatan kepada setiap anggota masyarakat untuk memaksimalkan potensi yang ada dan lebih bisa memecahkan masalah yang ada antar komunitas tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mayo bahwa masyarakat itu sendiri edapat diartikan dalam dua konsep :

1. Masyarakat sebagai sebuah 'tempat bersama', yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
2. Masyarakat sebagai 'kepentingan bersama', yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus orang tua yang memiliki anak

dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan.

*b. Antropologi*

Kita sama-sama memahami bahwa antropologi merupakan khasanah keilmuan yang lebih memfokuskan perhatian pada tingkah pola manusia terhadap kebudayaan dan peradaban. Antropologi pun ternyata memiliki sumbangan yang signifikan dalam menjadi pondasi bangunan bagi pengembangan masyarakat.

Ilmu antropologi yang pada mulanya merupakan ilmu tentang evolusi manusia, masyarakatnya serta kebudayaannya, dan kemudian ilmu tentang sejarah persebaran kebudayaan-kebudayaan manusia di muka bumi, sering dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktikal.

Ilmu antropologi di negara-negara yang sedang berkembang, baik yang diusahakan oleh para sarjana antropologi asing maupun para sarjana dari negara yang bersangkutan, tentu bisa merupakan suatu ilmu dasar yang meneliti masalah-masalah mengenai asas-asas kebudayaan dan masyarakat guna mengembangkan konsep-konsep, metodologi serta teori-teori baru yang lebih seksama dan tajam, tetapi bisa juga merupakan ilmu terapan yang meneliti masalah-masalah perubahan serta pergeseran kebudayaan dan masyarakat dalam masa transisi sosial-budaya.

Antropologi mendasari ilmunya kepada pengembangan masyarakat lebih kepada permasalahan pembangunan yang dilakukn disetiap negara, contohnya Indonesia. Masalah-masalah yang ditemukan dalam antropologi dan relasinya dengan pengembangan masyarakat adalah masalah-masalah yang bersifat mendasar dan sangat penting penyelesaiannya, diantara masalah-masalah itu adalah :

1. Masalah penduduk,
2. Masalah struktur masyarakat desa,
3. Masalah migrasi, transmigrasi, dan urbanisasi,
4. Masalah intergrasi nasional,

## 5. Masalah pendidikan dan modernisasi.

Dimana yang sama-sama kita ketahui bahwa kelima masalah itu juga merupakan fokus perhatian para *community officer* dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus yang ada di masyarakat tersebut. *Community officer* mestilah memahami karakter penduduk setempat dalam tataran praktek penjalanan programnya, dan pengenalan karakter itu tentulah tak lepas dari pengamatan pola budaya, struktur sosial, adat-istiadat setempat, dan norma-norma yang berlaku di wilayah tersebut. Sehingga di sisi inilah peranan ilmu antropologi sangat menunjang dalam aplikasi program pemngembangan masyarakat.

Setidaknya antropologi juga memiliki pendekatan-pendekatan dalam memahami dan memecahkan suatu problema yang ada di masyarakat. Bidang antropologi tersebut, disebut juga dengan antropologi terapan. Metodologi pendekatan yang khusus itu adalah :

- pendekatan masalah secara holistic
- pendekatan masalah secara mikro
- pendekatan masalah secara komparatif.

Pendekatan secara holistik selalu mencoba meneliti suatu masalah sosial budaya dalam rangka kehidupan masyarakat sebagai kesatuan menyeluruh. Metodologi holistik dikembangkan oleh ilmu antropologi, waktu ilmu itu masih dalam fasenya terutama meneliti masyarakat pedesaan kecil.

Pendekatan secara mikro adalah konsekuensi lebih lanjut dari penelitian-penelitian terhadap komuniti desa atau masyarakat kecil dalam waktu yang lama.

Sedangkan metodologi komparatif adalah metodologi pendekatan yang telah dilakukan oleh para ilmuwan antropologi. Salahsatu metodenya adalah cross cultural method. Dalam hal nitu dipergunakan satu atau beberapa gejala sosial-budaya yang berkaitan erat dibandingkan dengan gejala-gejala yang serupa dalam suatu sampel yang cukup besar dari kebudayaan-kebudayaan suku-bangsa yang tersebar dimuka bumi.

### c. Hukum

Hukum pun memiliki sumbangan yang sangat besar bagi pengembangan masyarakat, ranah hukum memiliki andil besar dalam melakukan pemberian advokasi kepada masyarakat. Sedangkan advokasi pun merupakan bentuk pelayanan dan bimbingan dari para *community officer*. Bentuk pelayanan advokasi yang seringkali dilakukan oleh para *community development officer* adalah melakukan pembelaan terhadap rakyat korban pengusuran. Tentunya pengembangan masyarakat tak dapat melakukannya sendiri, melainkan mesti ada bantuan dari lembaga terkait yang bersifat netral dan memihak kepada keadilan dalam melakukan perlawanan dan pembelaan secara hukum.

Pemberian advokasi secara hukum sangatlah membantu kinerja seorang *community officer*. Dan biasanya pula beberapa lembaga bantuan hukum yang bersifat independen dan non-pemerintah memberikan advokasi sesuai dengan perundang-undangan yang ada, lembaga hukum yang independen itu juga membantu masyarakat untuk bersikap partisipatif dengan melalui perantara *community officer*.

Diantara wujud partisipasi yang diadvokasi oleh, dari dan untuk masyarakat ialah masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan pada salah satu peraturan perundang-undangan yang akan dibuat seperti terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan tersebut berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

### **3. Konsep Perubahan Masyarakat**

Keadaan yang buruk atau rusak merupakan persoalan yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam segala aspek kehidupan sekaligus mengganggu segala bentuk aktivitas yang ada di masyarakat. Secara definisi, masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling berinteraksi dan memiliki komponen perubahan yang dapat mengikat satu

individu dengan individu lain dengan perilakunya. Sedangkan perubahan merupakan peralihan kondisi yang tadinya buruk, menjadi baik. Masyarakat yang berubah adalah masyarakat yang terdiri dari individu berkepribadian (*personality*) baik. *Personality* tidak dibentuk dari *performance* dan *style* seseorang, melainkan dari adanya daya intelektual dan perbuatan. Selanjutnya, tidak hanya membentuk saja, tapi juga disertai upaya menjadikan *personality* tersebut berkualitas.

Perubahan masyarakat atau social change ialah suatu pergantian atau modifikasi pola kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang menjadi penyebab perubahan masyarakat dapat timbul dari dalam kehidupan masyarakat sendiri maupun yang datang dari luar diri masyarakat tersebut. Kedua faktor yang menjadi sebab perubahan masyarakat, baik faktor intern maupun faktor ekstern, tidak dapat dipilih secara tegas. Acuan perubahan yang disengaja ini tetap berlandaskan pada dalil-dalil perubahan alami, akan tetapi dirancang dengan persiapan perencanaan secara matang dan dikelola pula dengan manajemen yang baik. Karena masyarakat mengharapkan agar perubahan yang disengaja tersebut dapat membuahkan hasil berupa kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Perubahan masyarakat yang disengaja, yang direncanakan dan dikelola dengan penerapan manajemen yang baik ini dinamakan pembangunan masyarakat atau dikenai pula dengan istilah social development atau community development. Jadi pembangunan adalah upaya melakukan perubahan masyarakat yang dilaksanakan dengan sengaja, yang direncanakan secara matang dan dikelola dengan penerapan manajemen. Pancasila sebagai landasan reformasi masyarakat dan pemerintah Indonesia, mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan reformasi baik yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat maupun berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan, keduanya harus berpijak pada etika moral yang terkandung dalam lima prinsip

Pancasila sebagai satu kesatuan tata nilai. Reformasi sebagai perubahan masyarakat tentu saja menimbulkan dampak yang positif maupun yang negatif bagi kehidupan masyarakat. Evaluasi pelaksanaan reformasi baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif perlu dilakukan sekarang agar lima atau sepuluh tahun

yang akan datang membuahkan hasil yang makin mendekatkan kehidupan masyarakat ke arah terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil. Untuk mengantisipasi dinamika perubahan nasional maupun perubahan global tersebut langkah reformasi harus lebih difokuskan pada upaya peniadaan dampak-dampak negatif yang menghambat dinamika kehidupan masyarakat, yaitu antara lain. Pertama, pembenahan kembali penataan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat. Konsep dinamika kelompok menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami perubahan sosial. Kurt Lewin dikenal sebagai bapak manajemen perubahan, karena ia dianggap sebagai orang pertama dalam ilmu sosial yang secara khusus melakukan studi tentang perubahan secara ilmiah. Konsepnya dikenal dengan model *force-field* yang diklasifikasi sebagai model *power-based* karena menekankan kekuatan-kekuatan penekanan. Menurutnya, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (*driving forces*) akan berhadapan dengan penolakan (*resistences*) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat *driving forces* dan melemahkan *resistences to change*.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu :

1. *Unfreezing*, merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya, atau adanya kebutuhan untuk berubah.
2. *Changing*, merupakan langkah tindakan, baik memperkuat *driving forces* maupun memperlemah *resistences*.
3. *Refreezing*, membawa kembali kelompok kepada keseimbangan yang baru (*a new dynamic equilibrium*).

Pada dasarnya perilaku manusia lebih banyak dapat dipahami dengan melihat struktur tempat perilaku tersebut terjadi daripada melihat kepribadian individu yang melakukannya. Sifat struktural seperti sentralisasi, formalisasi dan stratifikasi jauh lebih

erat hubungannya dengan perubahan dibandingkan kombinasi kepribadian tertentu di dalam organisasi.

Lippit mencoba mengembangkan teori yang disampaikan oleh Lewin dan menjabarkannya dalam tahap-tahap yang harus dilalui dalam perubahan. Terdapat lima tahap perubahan yang disampaikan olehnya, tiga tahap merupakan ide dasar dari Lewin. Walaupun menyampaikan lima tahapan Tahap-tahap perubahan adalah sebagai berikut :

1. Tahap inisiasi keinginan untuk berubah
2. Penyusunan perubahan pola relasi yang ada
3. Melaksanakan perubahan
4. Perumusan dan stabilisasi perubahan
5. Pencapaian kondisi akhir yang dicita-citakan

Merancang pembangunan memerlukan peran serta dari berbagai pihak, bukan saja dari pihak internal. Pihak eksternal juga mempunyai peran dalam perancangan pembangunan ini. Kita sering mendengar istilah agen perubahan. Agen perubahan dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal. Agen bermanfaat dalam menjembatani senjang kebudayaan yang terjadi antara kelompok masyarakat tersebut dengan pihak luar. Agen perubahan dapat pula dipandang sebagai penghubung dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok masyarakat sasaran.

Konsep pokok yang disampaikan oleh Lippit diturunkan dari Lewin tentang perubahan sosial dalam mekanisme interaksional. Perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (*driving forces*) akan berhadapan dengan penolakan (*resistences*) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat *driving forces* dan melemahkan *resistences to change*. Peran agen perubahan menjadi sangat penting dalam memberikan kekuatan *driving force*.

### **3. Strategi Pengembangan sosial**

Perubahan sosial merupakan suatu hal yang dinamis. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sosial diperlukan strategi. Dilihat dari strategi pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Midgley (1995: 103-138) dan Adi (2003: 49) mengemukakan ada 3 strategi besar, yaitu:

1. Pembangunan Sosial melalui Individu (social development by individuals)

Dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah pada pendekatan individualis.

2. Pembangunan Sosial melalui Komunitas (Social Development by Communitites)

Kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (communitarian approach).

3. Pembangunan Sosial melalui Pemerintah (Social Development by Government)

Pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi peemrintah. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (statis approach).

Dengan kondisi Indonesia yang begitu kompleks maka ketiga strategi ini perlu terus dilaksanakan. Artinya, ketika pemerintah melakukan pembangunan sosial, maka peran-peran dari swasta dan sektor ketiga (masyarakat madani) terus ditumbuhkan. Sehingga, tidak terjadi dominasi pemerintah dalam penanganan pembangunan sosial.

#### **4. Konsep Pembangunan Masyarakat**

Perkembangan pembangunan di Indonesia yang semakin pesat dan proses reformasi yang terjadi selama ini, konsep pembangunan masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting, yaitu bagaimana merancang suatu kegiatan pembangunan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Pembangunan di Indonesia selama ini umumnya menganut sistem "panutan atau wakil masyarakat" ternyata memberikan dampak bahwa masyarakat secara umum merasa tidak diperhatikan. Hal ini terlihat dari banyaknya gugatan-gugatan yang muncul di dalam masyarakat, yang dalam hal ini diungkapkan oleh organisasi-organisasi di luar pemerintah seperti Ornop, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi (mahasiswa), KADIN, WALHI dan lain sebagainya. Mereka membuat suatu konsep perencanaan pembangunan yang sarat dengan argumentasi secara persuasif.

Pemerintah dalam membuat perencanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada sisi pendapatan, pajak sebagai suatu instrumen penerimaan negara dalam sistem pemungutannya tidak dapat dilepaskan dari acuan konsep Pembangunan Masyarakat.

Landasan Teoritis dalam Pembangunan Masyarakat Dalam konsep Community Development atau pembangunan masyarakat, teknik perencanaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan advokasi
2. Perencanaan komunikatif.
3. Pemberdayaan.

Dalam konsep pembangunan masyarakat, perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan kejadian di masa depan, menganalisa keadaan dan menyelesaikan masalah, bersifat rasional dan disusun dengan menggunakan metode tertentu, untuk memperkirakan sesuatu keadaan di masa depan berdasarkan data dan informasi masa lalu dan sekarang.

Dalam menjalankan perannya, seorang perencana terlibat dalam suatu proses politis, yaitu sebagai pembela suatu kepentingan, baik pemerintah, organisasi atau kelompok lainnya dalam menentukan arah dan kondisi masa depan yang akan dicapai.

Produk dalam suatu perencanaan:

- 1) Unitary Plan.

Perencanaan komprehensif yang disusun oleh satu lembaga, umumnya oleh pemerintah. Perencanaan ini biasanya bersifat tidak lengkap dan tidak memadai karena membutuhkan beban waktu, tenaga dan biaya yang terlalu besar.

## 2) Plural Plan.

Perencanaan yang disusun oleh lembaga lain sebagai alternatif dari unitary plan. Keuntungan dari perencanaan plural antara lain:

- a. Sebagai sarana penyampaian informasi ke publik atas berbagai alternatif perencanaan.
- b. Memperbaiki praktek perencanaan dengan menempatkan "perencana pemerintah" pada posisi untuk bersaing secara profesional dengan perencana lain.
- c. Mendorong kritikus perencanaan untuk mengajukan alternatif yang lebih baik.

## Perencanaan Advokasi

Perencanaan advokasi adalah perencanaan yang muncul pada konsep perencanaan plural. Perencanaan ini yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung pernyataan/ pemikiran yang saling berkompetisi, dalam hal bagaimana masyarakat harus membangun. Konsep advokasi ini muncul dari praktek hukum yang berimplikasi pada sanggahan/ perlawanan yang muncul dari masing-masing pihak, yang memiliki dua pandangan yang saling bersaing.

Perencanaan advokasi banyak dilakukan bukan oleh perencana (formal), melainkan oleh pekerja sosial dan organisator kemasyarakatan dan mahasiswa. Para perencana advokasi bekerja karena adanya suatu kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan perencana pada saat proses pembangunan berlangsung.

Kelompok ini umumnya berada dalam kelompok berpenghasilan rendah. Adapun tugas yang dilakukan oleh Perencana advokasi adalah:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang suatu konsep perencanaan.

2. Menunjukkan penyimpangan/ kecenderungan yang melandasi informasi yang disajikan dalam rencana lain. Dalam proses ini, perencana advokasi bertindak layaknya seorang ahli hukum dalam persidangan di pengadilan, yaitu adu argumentasi berdasarkan fakta dan logika. Akibat yang diharapkan adalah perencana pihak lain akan lebih berhati-hati dan akurat dalam menyusun usulan rencananya.
3. Mendidik. Perencana memberikan informasi kepada pihak lain atas kondisi, masalah dan gambaran dari kelompok yang diwakili.
4. Memusatkan perhatian pada membantu kliennya dalam memperjelas suatu konsep, pemikiran dan masalah yang dihadapi.
5. Melaksanakan proses perencanaan dan berargumentasi secara persuasif atas usulan rencananya

Adapun pihak-pihak yang banyak melakukan perencanaan advokasi adalah:

- a. Partai Politik (hanya aspirasi yang diucapkan, secara realita amat jarang terjadi).
- b. Wakil kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti KADIN, kelompok advokasi masyarakat, Ahli Perencana, Praktisi/ Akademisi, Mahasiswa (Walhi, LBH, dan lain-lain).
- c. Kelompok ad-hoc lainnya
- d. Lembaga eksekutif dan legislatif.

### Perencanaan Komunikatif

Perencanaan komunikatif adalah perencanaan yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran akan diri sendiri, dan keinginan yang muncul melalui hubungan antar sesama melalui komunikasi dan kerja sama kolektif.

Dalam prakteknya, hal muncul pada kondisi mendengar, belajar dan memahami satu sama lain. Dengan demikian, muncul konsep untuk membuat perencanaan yang mendekati bentuk-bentuk partisipatif, yang menampung argumentasi, pembelajaran masyarakat yang menerima kontribusi seluruh anggota masyarakat dan menerima keanekaragaman masyarakat dalam mengenali, menilai dan mengartikan sesuatu (konsep).

Cara melakukan Perencanaan Komunikatif:

- a) Pemetaan (siapa aktor pembangunan, tokoh masyarakat, siapa anggota masyarakat, apa saja arena komunikasi yang tersedia, bagaimana arena komunikasi terbentuk, siapa yang memiliki akses ke arena ini, dan lain sebagainya).
- b) Pencarian (apa yang didiskusikan, bagaimana mendiskusikannya, apa arti sesuatu isu untuk masing-masing orang/ kelompok, dan lain-lain). Ini tahapan kritis, karena proses ini tidak mudah dilaksanakan dan pemahaman akan suatu isu terbentuk di sini.

Beberapa hal penting dari Perencanaan Komunikatif:

- a. Adanya penampungan argumentasi.
- b. Adanya pengorganisasian pemikiran dan pengusulan alternatif pemecahan masalah.

Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan konsep yang muncul setelah adanya perencanaan advokasi dan perencanaan komunikatif. Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses/ mekanisme di mana sekelompok orang, organisasi atau masyarakat memiliki penguasaan atas masalah yang dialami (Rappaport, 1987, p.122).

Sedangkan menurut Cornell Empowerment Group, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang sedang dan terus berlangsung secara sengaja dan berpusat pada masyarakat lokal yang berpikiran kritis, memiliki prinsip saling menghormati, kepedulian

terhadap sesama dan partisipasi kelompok, yang mana melalui proses ini mereka yang tidak memiliki akses akan keadilan alokasi sumber daya, memiliki akses dan kendali akan sumber daya tersebut (Perkins and Zimmerman, 1995, p. 570).

Dari uraian di atas, pembangunan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, melalui berbagai metode seperti bantuan teknis, usaha mandiri dan konflik (Christenson and Robinson, 1989, p. 32).

Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sedangkan Giarci (2001) memandang community development sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan collective action dan networking yang dikembangkan masyarakat.

Sedangkan Bartle (2003) mendefinisikan community development sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokal tumbuh, collective power-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.

Pembangunan masyarakat dapat diartikan sebagai pembangunan yang dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat didasarkan kemauan masyarakat itu sendiri. Pembangunan masyarakat mencakup, Pembangunan ekonomi, Politik, Sosial Budaya, dan Teknologi.

Menurut PBB, Pembangunan Masyarakat/Pembangunan Komunitas adalah suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut Sanders, Pembangunan Masyarakat dapat dipandang pada:

1. Proses
2. Program (contoh: Raskin, BLT)
3. Gerakan (contoh: KB untuk pembatasan kelahiran)
4. Metode

Pembangunan Masyarakat adalah proses perubahan yang bersifat multi dimensi menuju kondisi semakin terwujudnya hubungan yang serasi antara *needs* dan *resources* melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk membangun. Awal tahun 1951 Pembangunan Masyarakat dimaknai sebagai pendidikan, karena dengan pendidikan diharapkan dapat terwujudnya pembangunan bagi masyarakat. Secara umum *community development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan berikutnya. Dengan dasar itulah maka pembangunan masyarakat secara umum ruang lingkup program-programnya dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut :

1. *community service*
2. *community empowering*
3. *community relation*

Solihin (2006), mengungkapkan tiga tahapan perencanaan pembangunan yaitu :

1. perumusan dan penentuan tujuan
2. pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia
3. pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama.

Dari ketiga tahapan perencanaan tersebut dapat didefinisikan perencanaan pembangunan wilayah atau daerah sebagai berikut yaitu suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor) baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat stakeholder lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling

ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya.

Adi (2003 : 81-82), pada perencanaan sosial tidak ada asumsi yang pervasif mengenai tingkat intraktabilitas ataupun konflik kepentingan. Dalam perencanaan sosial klien lebih dilihat sebagai konsumen dari suatu layanan (service), dan mereka akan menerima serta memanfaatkan program dan layanan sebagai hasil dari proses perencanaan.

Suzetta (2007) menjelaskan bahwa, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 dan No. 40 Tahun 2006. Sistem perencanaan ini diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pelaku pembangunan sehingga menghasilkan sinergi yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Proses Pembangunan Masyarakat:

1. Rendahnya modal finansial
2. Minimnya sarana infrastruktur (jalan, sarana transport)
3. Rendahnya kesadaran masyarakat (kedisiplinan kurang)
4. Rendahnya kualitas SDM
5. Rendahnya komunikasi, informasi dan koordinasi
6. Berkurangnya tokoh panutan (tokoh masyarakat)

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari:

1. Terberantasnya pengangguran
2. Terberantasnya kemiskinan
3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

## **5. Prinsip-prinsip Pembangunan Masyarakat**

Pembangunan Masyarakat diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip : keterpasuan, berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri, dan kaderisasi.

Prinsip keterpaduan mengandung arti bahwa program atau kegiatan pembangunan masyarakat disusun oleh, bersama, dalam dan untuk masyarakat atas dasar kebutuhan dan berbagai sumber yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam berbagai aspek kehidupan. Perencanaan program dapat ditempuh dengan menggabungkan perencanaan dari masyarakat (bottom-up planning) dengan perencanaan dari atas yaitu pemerintah (top-down planning) sehingga program pembangunan masyarakat dapat berintegrasi dengan program pembangunan nasional dan daerah. Pelaksanaan dan evaluasi program dilakukan oleh masyarakat dengan memperoleh bantuan dari pihak lain baik pemerintah, para ahli maupun lembaga-lembaga terkait.

Prinsip berkelanjutan memberi arah bahwa pembangunan masyarakat tidak dilakukan sekaligus melainkan diselenggarakan secara bertahap, terus-menerus menuju ke arah yang lebih baik. Program yang telah berhasil merupakan titik awal untuk program berikutnya sedangkan suatu program yang perlu diperbaiki dan dikembangkan menuntut adanya kegiatan berkelanjutan.

Prinsip keserasian mengandung makna bahwa program pembangunan masyarakat memperhatikan keserasian antara kebutuhan teras yang dinyatakan oleh perorangan, masyarakat, lembaga-lembaga dan pemerintah. Keserasian ini tercermin dalam kegiatan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat banyak dan pemerintah. Kegiatan dan sasarannya mengarah pada terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani serta keseimbangan dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Keserasian dicerminkan pada kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan. Keserasian ini perlu tercermin dalam keterkaitan antara program pembangunan masyarakat dengan program-program sektoral dari instansi pemerintah dan program-program lembaga kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat.

Prinsip kemampuan sendiri menegaskan bahwa program pembangunan masyarakat disusun dan dilaksanakan dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Keikutsertaan pihak luar adalah untuk memberi dorongan dan bantuan sehingga masyarakat dapat mendayagunakan sumber-sumber yang mereka miliki secara efisien dan efektif.

Prinsip kaderisasi bahwa pengelola dan kelanjutan program pembangunan masyarakat hanya akan terlaksana dengan baik dan berkelanjutan apabila dalam masyarakat tersebut telah disiapkan kader-kader yang berasal dari masyarakat yang memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dan aspirasi membngun untuk memenuhi kepentingan bersama dan untuk mempersiapkan masa depan masyarakat yang lebih baik.